

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Konstitusi Pers.

_____. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Azhary, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Prenada Media.

Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. 2006. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Gultom, Lodewijk. 2007. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia*. Bandung : Utomo Bandung

Hadjar, Ibnu. 1996. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.

Khaleed, Badriyah. 2015. *Mekanisme Judicial Review*. Jakarta Selatan: Buku Seru.

Kishandajani. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro.

MD, Moh Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media.

Rasyid Thalib, Abdul. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

- Saparin, Sumber. 1972. *Tata Pmerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surianingrat, Bayu. 1980. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979*, (Jakarta: Metro Pos, 1980)
- _____. 1982. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Jakarta : Aksara Baru.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Alia Harumdani Widjaja. *Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa*. Volume 14 (Jakarta: 2017).
- Mahmud Aziz. 2010. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Volume 7 Nomor 5, Jurnal Konstitusi (Jakarta : 2010).
- Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy'ari. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*. Volume 12 Nomor 3, Jurnal Konstitusi (Jakarta : 2015)
- Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, *Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, Volume 6, Nomor 3, Jurnal Konstitusi (Jember : 2009)

Skripsi

- Nur Inayah, 2017. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Calon Kepala Desa Dan*

Perangkat Desa. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten : Banten.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri
Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.

Makalah

I Nengah Suantra, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2016 Mengenai Pengujian Pasal 33 Ayat 1 Huruf G dan Pasal 50 Ayat 1 Huruf C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kekuatan Mengikat, Makna Filosofis, Dan Akibat Hukum Implementasi*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan tema “Mengkritisi Pasal 33 Ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Pasca Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2016” pada hari Kamis, 23 Maret 2017 di Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Bali, Denpasar).

A. Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia*, (Makalah disampaikan dalam Kajian Rutin di Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, dengan tema “*Konsep dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila*”, pada Jum’at, 22 April 2016.

Website

ASH, *Syarat Domisili Calon Kepala Desa Melanggar Konstitusi*<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bc2767ef821/syarat-domisili-calon-kepala-desa-melanggar-konstitusi>, diakses pada 13 Oktober 2018.

Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, <http://mkri.id/index.php?page=web.ProfileMK&id=1> diakses pada 14 Oktober 2018

Perangkat Desa, http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/perangkat-desa/ diakses pada 23 Oktober 2018.

Tanpa nama, *Praktik Judicial Review dan Legislative review di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review--judicial-review-di-republik-indonesia>, diakses pada 28 November 2018.

Indro Laksono, *Domisili Kandidat Kepala dan Perangkat Desa*, http://kedesa.id/id_ID/forums/topic/domisili-kandidat-kepala-dan-perangkat-desa/ diakses pada 17 Januari 2019 .

Tanpa Nama, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Permendagri 83 tahun 2015*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa-dalam-permendagri-83-tahun-2015> diakses pada 17 Januari 2019.

LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015